BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Bank Indonesia (BI) diberikan mandat untuk menyelenggarakan fungsi Bank Sentral di Indonesia. Hingga saat ini BI mengalami evolusi yang bermula sebagai bank komersial yang kemudian berkembang menjadi bank sirkulasi dan selanjutnya menjadi Bank Sentral yang modern dengan tujuan yang fokus serta independen sesuai dengan amanat UU No.23/1999 Tentang BI yang kemudian diamandemen menjadi UU No.3/2004 Tentang BI.¹

BI berawal dari De Javasche Bank NV (DJB) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 24 Januari 1827. Pada waktu itu, DJB bertindak sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi Bank Sentral lainnya serta melakukan kegiatan Bank Umum. Pemerintah Belanda memberikan hak *oktrooi* kepada DJB, yaitu hak untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden Belanda.²

Pada perkembangan selanjutnya, pada tanggal 06 Desember 1951 Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU tentang nasionalisasi DJB. Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 1953 dikeluarkan UU No.11 Tahun 1953 Tentang pokok-pokok Bank Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 01 Juli 1953, maka bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga Bank Sentral dengan nama Bank

¹ Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia*, h. 25.

²*Ibid*, h. 26

Indonesia (BI), sejak saat itu, BI secara resmi menjadi Bank Sentral menggantikan fungsi DJB. Hingga tahun 1968, tugas pokok BI sebagai Bank Sentral, selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang dan mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melaksanakan fungsi bank umum (bank komersial). Meskipun demikian, tanggung jawab kebijakan moneter berada di pihak Dewan Moneter (DM) yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas DM adalah menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh BI. Di samping itu, DM juga memberi petunjuk kepada direksi BI dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan memajukan perkreditan dan perbankan.

Sadar akan kelemahan peran ganda yang dijamin oleh BI yaitu kurang sehatnya perkembangan moneter bagi perekonomian, maka pemerintah pada tahun 1968 dikeluarkan UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Indonesia. UU ini menghapus peran ganda BI, yakni BI tidak lagi melaksanakan fungsi-fungsi bank komersial. Meskipun demikian, dalam UU ini BI tetap sebagai agen pembangunan dan sebagai kasir pemerintah serta *bankers bank*. Di samping itu, UU ini tetap mempertahankan tugas dan fungsi DM. Tugas pokok BI sebagai agen pembangunan terlihat pada tugas pokoknya, yaitu (1) mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, (2) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta (3) memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Visi, Misi dan Sasaran Strategis BI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

2. Misi Bank Indonesia

- a) Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- b) Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
- c) Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisiensi dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
- d) Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang.³

3. Sasaran Strategis Bank Indonesia

- a) Informasi yang berkualitas dalam rangka mendukung kebijakan Kantor Pusat dan Pengembangan Ekonomi di wilayah kerja.
- b) Peningkatan sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah.

³<http://www.bi.go.id/id/publikasi/serikebanksentralan> (17 Maret 2018)

- a) Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di wilayah kerja.
- b) Pengelolaan keuangan satker secara efektif dan efisien.
- c) Mengoptimalkan kajian dan penyediaan informasi ekonomi di wilayah kerja.
- d) Meningkatkan pengawasan bank yang efektif yang mendukung pengembangan ekonomi di wilayah kerja.
- e) Meningkatkan pelayanan dan prasarana sistem pembayaran.
- f) Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang efektif kepada *stakeholders*.
- g) Mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.
- h) Memperkuat organisasi dan mengembangkan SDM yang berkompentensi tinggi dengan dukungan Budaya Kerja yang berbasis pengetahuan.

C. Status Dan Kedudukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia

a. Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.⁴

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk

⁴ Julius Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 122.

apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

b. Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

D. Tugas Pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai undang-undang Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu:

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Pada dasarnya, kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro dan berpengaruh besar terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan masyarakat. Sejalan dengan itu, amandemen UU No.3 Tahun 2004 menekankan agar kebijakan moneter Bank Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.⁵

Ketentuan ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang diambil Bank Indonesia dapat dijadikan acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat lainnya. Disamping itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar kebijakan moneter Bank Indonesia sudah mempertimbangkan dan dapat dikoordinasikan secara baik dengan kebijakan

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 159.

fisikal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditempuh Pemerintah sehingga mampu menciptakan kondisi ekonomi makro yang baik, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu dengan:

a. Kewenangan Menetapkan Penggunaan Alat Pembayaran

Secara umum, terdapat dua jenis alat pembayaran yaitu alat pembayaran tunai (uang kertas dan logam) dan nontunai (berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro dan wesel maupun berbasis elektrik seperti kartu kredit dan ATM. Kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran tunai meliputi mengeluarkan, mengedarkan, menarik, dan memusnahkan uang rupiah, termasuk menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan, serta tanggal mulai berlakunya. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa berupaya menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai.

Sementara itu, untuk alat pembayaran nontunai, Bank Indonesia berwenang menetapkan bentuk, keabsahan maupun keamanan penggunaannya dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini ditunjukkan untuk meyakinkan bahwa seluruh alat pembayaran yang dipergunakan termasuk pengoperasiannya dilakukan secara aman serta dikelola dan dimonitor secara baik.

b. Kewenangan Mengatur dan Menyelenggarakan Sistem Pembayaran

Pengaturan diperlukan untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Terkait dengan itu, Bank Indonesia berwenang menyelenggarakan sendiri

sistem pembayaran atau memberi izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dengan kewajiban menyampaikan laporan kegiatannya kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berwenang mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antarbank, serta menyelenggarakan kliring antarbank, serta menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.⁶

c. Mengatur dan Mengawasi Bank

Berdasarkan undang-undang, kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi:

1. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank.
2. Menetapkan peraturan di bidang perbankan.
3. Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan.

Keempat kewenangan tersebut merupakan satu kesatuan dalam mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Ketentuan perizinan ditujukan untuk meyakinkan bahwa bank yang diperbolehkan beroperasi mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh pengurus bank yang kompeten dan mempunyai integritas yang tinggi.

E. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Bentuk struktur organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah struktur organisasi garis dan staff. Secara struktural, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang pimpinan dengan kualifikasi

⁶*Ibid*, h. 160.

pegawai golongan VII. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh Deputi Pemimpin (Golongan VII) yang mengkoordinir bidang-bidang yang ada pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara kelas I, sebagaimana struktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Adapun tugas–tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mencakup bidang moneter, pengawasan bank, sistem pembayaran, dan manajemen intern.
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas KKBI (Koordinasi Kantor Bank Indonesia dan Kantor Bank Indonesia yang berada dibawah koordinasinya).
- c. Menyediakan informasi dan masukan/sasaran untuk Pemerintah Daerah, Perbankan, dan pihak terkait dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.
- d. Mengkoordinasi dengan pihak terkait upaya pemberdayaan sektor rill dan UMKM di daerah serta mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah.
- e. Memberikan masukan kepada Kepala Kantor Pusat mengenai kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya.

2. Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi

Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan:

- i. Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan
- ii. Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilane

b) Divisi Pengembangan Ekonomi:

- i. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan

ii. Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM

3. Grup SP, PUR, Layanan Administrasi

a) Tim PUR dan Operasi SP:

i. Unit Distribusi Uang Kasir Senior

ii. Unit Layanan dan Administrasi Kasir Senior

iii. Unit Pengolahan Uang Kasir Senior

iv. Unit Operasional SP Kepala Unit

b) Tim Pengawasan SP, PUR dan KI Kepala Tim:

i. Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR

ii. Fungsi Analisis SP dan PUR serta KI dan Perlindungan Konsumen

c) Satuan Layanan dan Administrasi Kepala Satuan:

Fungsi SDM, Logistik Anggaran, Sekretariat, Protokol dan Pengamanan